



**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

(DRAF)

**RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2016-2021**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DHARMARAYA
TAHUN 2017**

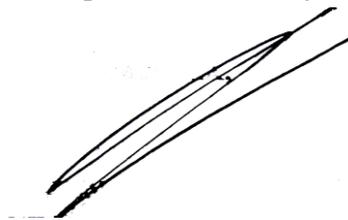
KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat dan karunia-NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan Pembuatan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 yang pertama kali dibuat sesuai dengan Organisasi Perangkat Daerah yang baru terbentuk. Dengan penuh keterbukaan dan senang hati kami sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Dharmasraya.

Akhir kata, semoga Renstra yang sederhana ini dapat bermanfaat khususnya bagi Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Dharmasraya dan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada umumnya.

Pulau Punjung, Mei 2017

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi
Kabupaten Dharmasraya,



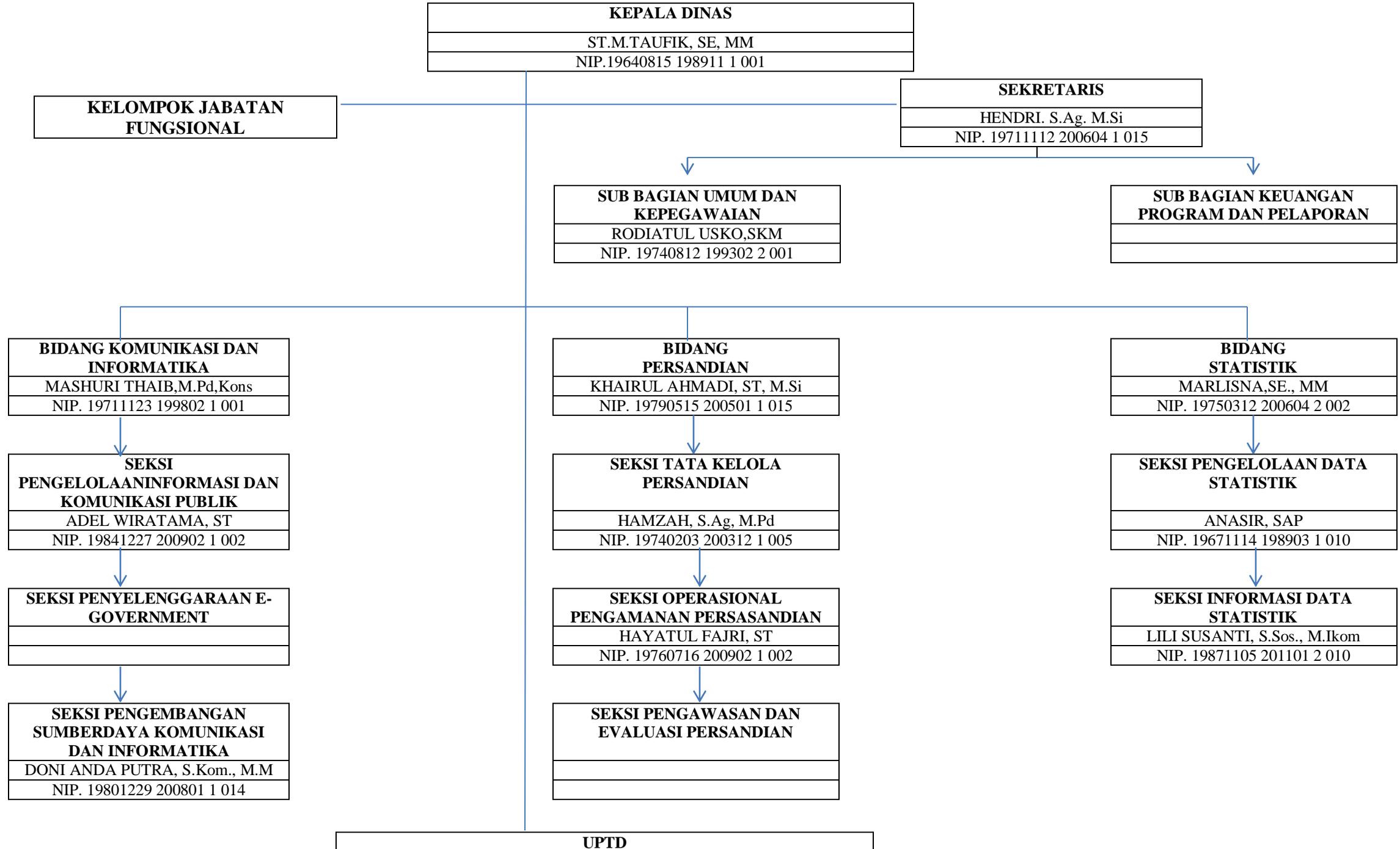
ST.M.TAUFIK, SE. MM.
Pembina TK.I
NIP. 19640815 198911 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS	6
2.1. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika.....	6
2.2. Tugas dan Fungsi	7
2.3. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika.....	15
2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan.....	17
2.5. Tantangan dan Peluang.....	21
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI --	23
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	23
3.2. Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah	24
3.3. Telaah Renstra Organisasi, Lembaga/Kementrian	25
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kondisi Lingkungan Strategis.....	26

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis -----	27
BAB IV TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARAN STRATEGI & KEBIJAKAN -----	30
4.1. Tujuan dan Sasaran -----	30
4.2. Strategi dan Kebijakan -----	31
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN-----	32
5.1. Rencana Program dan Kegiatan-----	32
5.2. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif -----	39
BAB VI INDIKATOR TAHUNAN -----	40
BAB VII PENUTUP -----	48
• LAMPIRAN 1 Matrik Rencana Strategi Tahun 2016 - 2021	

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya berdiri berdasarkan peraturan daerah kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2016 Nomor 6, tambahan lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64).

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya merupakan OPD yang baru dibentuk pada Tahun 2017 yang sebelumnya merupakan Bidang Komunikasi dan Informatika pada SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika Pariwisata dan Budaya Kabupaten Dharmasraya, sedangkan Bidang Persandian merupakan salah satu dari kegiatan Bidang Komunikasi dan Informatika yang saat ini menjadi Bidang Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Bidang Statistik merupakan pecahan dari salah satu bidang pada BAPPEDA yang mana saat ini menjadi Bidang Statistik di Dinas Komunikasi dan Informatika yang bergerak dibidang Statistika Sektoral yakni bidang Sosial, Ekonomi, Hukum, Politik dan Ham.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);

Maka berdasarkan perkembangan yang ada sejak tanggal 27 Desember 2016, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya mulai menjalankan roda Organisasi karna pada tanggal tersebut baru dilantiknya pejabat dilingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya.

Mengingat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru dibentuk maka perlu disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 dilakukan dengan berlandaskan kepada beberapa ketentuan hukum, perundang-undangan, dan peraturan pendukung lainnya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat.
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
4. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud penyusunan RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya adalah merumuskan kebijakan, program dan kegiatan lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya yang pelaksanaannya akan lebih efisien dan efektif berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

B. TUJUAN

Rencana strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 disusun dengan tujuan untuk memberikan landasan pemerintah dalam melakukan sinergi dengan komunitas TIK dalam menjawab tantangan dan permasalahan yang ada di masyarakat secara responsif, sebagai upaya pertanggungjawaban layanan publik yang profesional berbasis TIK.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Membahas dan menjabarkan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DHARMASRAYA

Membahas dan menjabarkan mengenai Tugas Pokok dan fungsi , Sumberdaya serta Kinerja Pelayanan Dinas serta Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Membahas dan menjabarkan mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Telaahan Visi dan Misi dan Program KDH dan WKDH terpilih.
2. Penentuan Isu Strategis.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN , DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Menjelaskan Visi , Misi, Tujuan, Sasaran, dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah selama 5 Tahun ke depan juga program unggulan Kepala Daerah yang perlu didukung melalui Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Menjelaskan tentang Matriks rencana program Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjabarkan dan mengimplementasikan Rencana Kerja dalam kegiatan tahunan.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA

Menjelaskan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang disusun secara Matriks untuk mengetahui capaian awal dan akhir setelah program kerja dilaksanakan

BAB VII PENUTUP

Menjelaskan prasyarat keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengimplementasikan seluruh Renstra ini.

BAB II

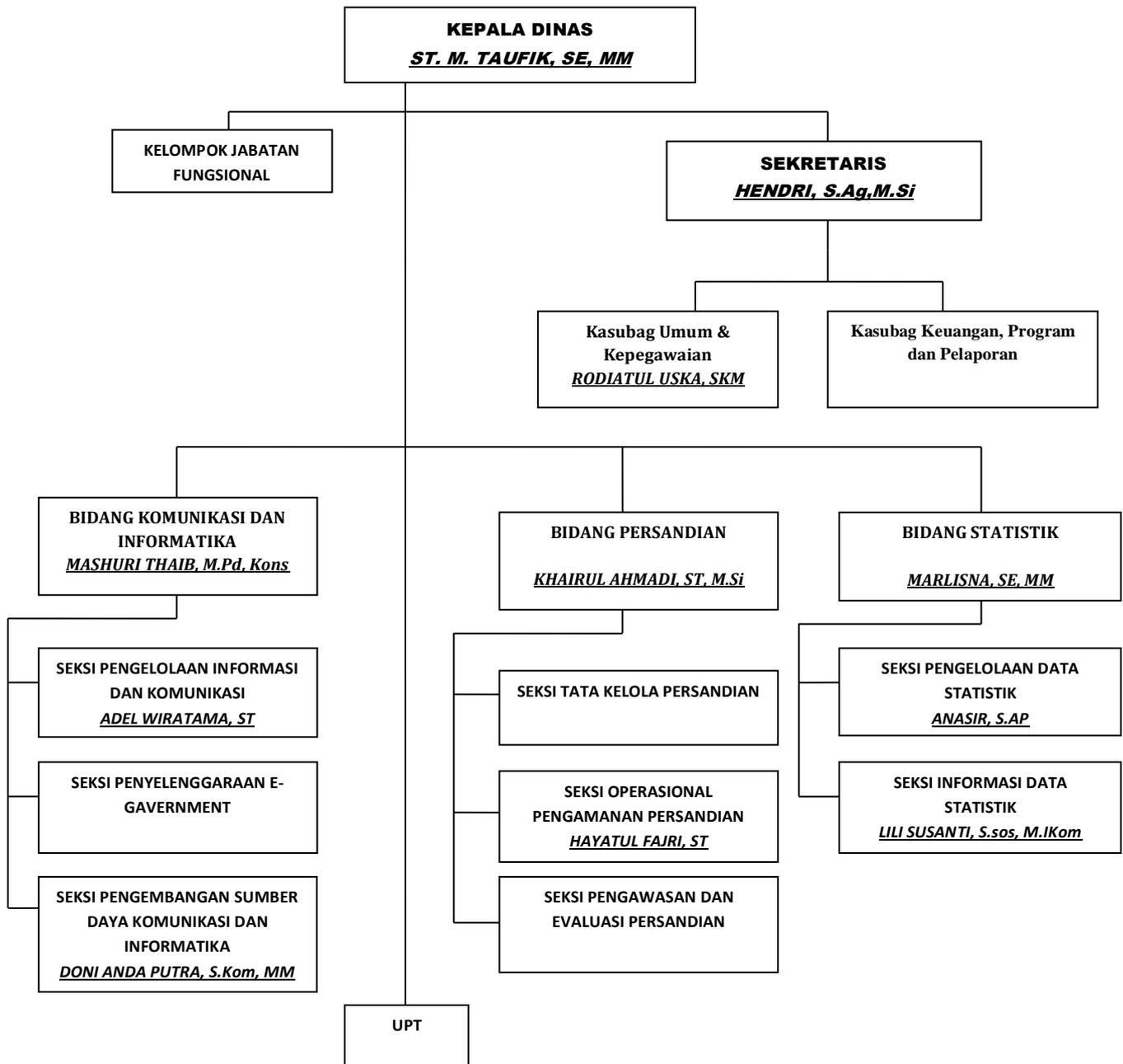
GAMBARAN PELAYANAN DINAS

2.1. Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya dipimpin oleh satu orang kepala Dinas, dibantu oleh satu orang Sekretaris, 2 orang Kepala Sub.Bagian, 3 orang Kepala Bidang dan 6 orang Kepala Seksi. Secara struktural dapat diuraikan sebagai berikut, Kepala Diskominfo (Ess IIa) dibantu oleh:

1. Sekretaris (Ess IIIa), yang membawahi 2 sub bagian (Ess IVa), yaitu :
 - a) Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. 3 Kepala Bidang (Ess IIIa), yang masing-masing membawahi 3 dan atau 2 seksi (Ess IVa), yaitu :
 - a) Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahi 3 seksi, yaitu:
 - a. Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
 - b. Seksi Penyelenggaraan E-Government.
 - c. Seksi Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Informatika.
 - b) Kepala Bidang Persandian, membawahi 3 seksi , yaitu :
 - Seksi Tata Kelola Persandian.
 - Seksi Operasional Pengamanan Persandian.
 - Seksi Pengawasan dan Evaluasi Persandian.
 - c) Kepala Bidang Statistik, membawahi 3 seksi , yaitu:
 - a. Seksi Pengelolaan Data Statistik
 - b. Seksi Informasi Data Statistik

Tabel 2.1 Struktur Organisasi



2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64), dan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut :

I. KEPALA DINAS

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian Tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Dinas;
 - b. Merumuskan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas;
 - c. Merumuskan LPPD, LKPj, LkjIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya;
 - d. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - e. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas sekretariat dan bidang;
 - f. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati;
 - g. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Daerah dan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - h. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - i. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

II. SEKRETARIAT

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - d. Pengkoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - e. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan dinas; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dinas;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat;
 - c. Mengkoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan LPPD, LKPj, LKjIP dan segala bentuk laporan lainnya;
 - d. Merumuskan program dan kegiatan lingkup Sekretariat;
 - e. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah dilingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Mengkoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan dari setiap bidang;
 - g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada dinas;
 - h. Menganalisa kebutuhan pegawai pada dinas;
 - i. Membagi jumlah seluruh pelaksana dinas untuk ditempatkan pada setiap bidang sesuai dengan kebutuhan dan keahlian;
 - j. Menganalisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana;

- k. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- m. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

III. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- (1) Bidang Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, pemberian rekomendasi dan perijinan, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi komunikasi publik, penyelenggaraan e-goverment, dan pengembangan sumberdaya komunikasi, dan informatika.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Bidang Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang, penyiapan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis, pemberian rekomendasi dan perizinan, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi komunikasi publik, penyelenggaraan e-goverment, dan pengembangan sumberdaya komunikasi, informatika;
 - b. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
 - d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang Penyelenggaraan *e-Government*;
 - e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan *e-Government*;
 - f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan *e-Government*;
 - g. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan *e-Government*;

- h. Pengembangan sumber daya komunikasi SKPD dan BUMD, layanan nama domain bagi lembaga pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten;
 - i. Pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kabupaten.
 - j. Penyelenggaraan kegiatan bidang komunikasi dan informatika;
 - k. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang komunikasi dan informatika;
 - l. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang komunikasi dan informatika;
 - m. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:
- a. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bidang;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Seksi-Seksi lingkup bidang komunikasi dan informatika;
 - c. Mengkoordinasikan penyusunan LPPD, LKPJ, LKJIP dan segala bentuk pelaporan lainnya pada bidang;
 - d. Merumuskan program dan kegiatan pada bidang;
 - e. Menyiapkan bahan melaksanakan koordinasi dan pelayanan Komunikasi dan Informatika baik dengan seluruh satuan organisasi di lingkungan SKPD maupun dengan instansi terkait lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku dan sesuai arahan pimpinan;
 - f. Melaksanakan pemantauan kegiatan koordinasi masing-masing seksi sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebagai bahan evaluasi tugas pimpinan;
 - g. Mengevaluasi kegiatan koordinasi pada masing-masing seksi dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan;
 - h. Menganalisis pelaporan kegiatan koordinasi pada masing-masing seksi sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dan pertimbangan pimpinan;
 - i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan bidang Komunikasi dan Informatika dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - j. Melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggung jawaban dan rencana yang akan datang; dan
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

BIDANG PERSANDIAN

- (1) Bidang Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Kepala Bidang Persandian mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis di bidang Persandian. Dalam menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Bidang Persandian menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan Bidang Persandian di lingkungan pemerintah daerah;
 - b. Perumusan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi;
 - c. Pengelolaan informasi berklasifikasi;
 - d. Pengelolaan sumber daya persandian Daerah;
 - e. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan persandian Daerah;
 - f. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.
 - g. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang Persandian;
 - h. Penyelenggaraan kegiatan bidang Persandian;
 - i. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Persandian;
 - j. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang Persandian; dan
 - k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (4) Uraian tugas Kepala Bidang Persandian adalah sebagai berikut:
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bidang;
 - b. Merumuskan kebijakan Bidang Persandian di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. Mengelola informasi berklasifikasi;
 - d. Mengelola sumber daya persandian Daerah;
 - e. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan persandian Daerah;
 - f. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman;
 - g. Merencanakan kegiatan di bidang Statistik berdasar ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - h. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas bidang Persandian;
 - i. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Persandian setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - j. Melaksanakan pemantauan kegiatan koordinasi masing-masing seksi sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebagai bahan evaluasi tugas pimpinan;

- k. Mengevaluasi kegiatan koordinasi pada masing-masing seksi dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- l. Menganalisis pelaporan kegiatan koordinasi pada masing-masing seksi sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dan pertimbangan pimpinan;
- m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan bidang Persandian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- n. Melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan bidang Persandian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggung jawaban dan rencana yang akan datang;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- p. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Seksi-Seksi lingkup Bidang Persandian;
- q. Mengkoordinasikan penyusunan LPPD, LKPJ, LKJIP dan segala bentuk pelaporan lainnya pada bidang; dan
- r. Merumuskan program dan kegiatan pada bidang;

II. BIDANG STATISTIK

- (1) Bidang Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Kepala Bidang statistik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mempersiapkan, menganalisis dan menginformasikan data data pembangunan dan mengkoordinasikannya dengan seluruh OPD dan stekholder terkait.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Bidang statistik menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang statistik melalui perencanaan program lingkup bidang Statistik;
 - b. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang;
 - c. Pengkoordinasian rencana program dan kegiatan bidang statistik;
 - d. Menginventarisasi semua data statistik sektoral;
 - e. Pengkoordinasian dengan seluruh OPD dan stekholder terkait dalam penyusunan data statistik sektoral;
 - f. Menginformasikan data data statistik kepada seluruh OPD dan stekholder terkait;

- g. Mengevaluasi ketersediaan dan keakuratan data statistik sektoral;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil, telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsi;
- i. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

(4) Uraian tugas Kepala Bidang Statistik adalah sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Bidang Statistik;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Seksi-Seksi lingkup Bidang Statistik;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan LPPD, LKPj, LkjIP dan segala bentuk pelaporan lainnya pada bidang;
- d. Menyusun rencana program dan penganggaran bidang statistik;
- e. Melakukan pengumpulan data statistik daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
- f. Mengelola data statistik daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- g. Mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan statistik;
- h. Menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program statistik daerah;
- i. Menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- j. Menyajikan data statistik daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
- k. Meninformasikan data data statistik daerah kepada seluruh OPD dan stakeholder terkait;
- l. Melakukan pengamanan data statistik daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- m. Mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana program bidang statistik;
- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pekerjaan statistik secara periodik sebagai bahan evaluasi;
- o. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
- p. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

UPT (UNIT PELAYANAN TERPADU)

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas dapat dibentuk UPT sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada di atas, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
 - (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan dinas.
 - (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
 - (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Sumberdaya Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya saat ini sebanyak 16 orang, terdiri dari 11 laki-laki dan 5 perempuan. Dari sejumlah 16 pegawai tersebut, 16 orang telah berstatus PNS, dan jika ditinjau dari berbagai klasifikasi antara lain :

- 1) Berdasarkan jumlah pangkat/golongannya adalah sebagai berikut :
 - a. Golongan IV/b : 1 orang
 - b. Golongan IV/a : 2 orang
 - c. Golongan III/d : 3 orang
 - d. Golongan III/c : 5 orang
 - e. Golongan III/b : 1 orang

- f. Golongan III/a : 2 orang
- g. Golongan II/d : 1 orang
- h. Golongan II/c : 1 orang
- i. Golongan II/b : - orang
- j. Golongan II/a : - orang
- k. Golongan I/b : - orang
- l. Tenaga Kontrak : - orang

2) Berdasarkan Pendidikan Formal :

- a. Pasca Sarjana : 8 orang
- b. Sarjana : 5 orang
- c. D4 : 1 orang
- d. D3 : 1 orang
- e. SLTA : 1 orang
- f. SLTP : - orang
- g. SD : - orang

3) Berdasarkan Pendidikan Penjurangan, yaitu jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan penjurangan :

- a. Diklatpim Tingkat IV : 4 orang
- b. Diklatpim Tingkat III : 1 orang

4) Berdasarkan Esselon dalam jabatan struktural, yaitu pegawai yang menduduki jabatan structural :

- a. Esselon IIb : 1 orang
- b. Esselon IIIa : 1 orang
- c. Esselon IIIb : 3 orang
- d. Esselon IVa : 6 orang

5) Berdasarkan Kompetensi :

- a. Pelaksana Adm/Keuangan : 4 orang
- b. Operator website : 2 orang
- c. Operator Jaringan : 2 orang
- d. Operator sms gateway : 2 orang
- e. Sandiman : (belum ada)
- f. Statisi : (belum ada)

2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika

2.3.1. Data Infrastruktur

2.3.1.1. Jaringan

- Internet

Layanan akses internet saat ini bekerjasama dengan provider Telkom yang menggunakan fiber optic (serat fiber) baik Main connection dan Backup connection. Koneksi internet tersebut terbagi menjadi 2 bagian :

1. Koneksi Internasional (Global)

Main Connection international menggunakan bandwidth (Throughput) sebesar 10 MB dan Backup Connection sebesar 4 MB. Dimana admin dapat mengakses/melihat lalu lintas data dengan menggunakan MRTG (Monitoring Real Time Graph).

2. Koneksi Domestik (IIX)

Main Connection domestic memiliki bandwidth/throughput yang lebih besar dari koneksi international yaitu sebesar 20 MB dan Backup Connection sebesar 20 MB. Jalur ini dapat pula diakses/dilihat lalu lintas data dengan menggunakan MRTG (Monitoring Real Time Graph).

Jalur layanan internet ini terkoneksi keseluruhan Organisasi Perangkat Daerah. Untuk keamanan direncanakan firewall tahun ini.

- Intranet MAN (Metro Area Network)

Jalur intranet yang terdapat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya menggunakan system radio dengan sentral Dinas Komunikasi dan Informatika dan BAPPEDA Kabupaten Dharmasraya.

- Perangkat Keras (Acces Point, Router, Switch Hub, Network Tools Kit Dll).

1. Access Point

Access point dipergunakan Dinas Komunikasi dan Informasi untuk menjangkau pc komputer atau Notebook yang memiliki wireless.

2. Router

Dinas komunikasi dan Informasi memiliki 1 buah Router yang mana perangkat ini menghubungkan ke penyedia layanan internet. Router memiliki konfigurasi-konfigurasi yang berisi IP Address koneksi internet.

Router memiliki fungsi yang penting dikarenakan perangkat ini dapat meneruskan paket data yang dapat dinikmati dengan nama Internet.

3. Switch HUB

Switch merupakan perangkat dengan menggunakan layer 2 dan 3. Perangkat ini memiliki peranan yang penting dalam jaringan di Dinas Komunikasi dan Informasi. Perangkat Switch Layer 3 menangani pembagian VLAN dan juga pemberian distribusi Dynamic IP atau yang lebih dikenal DHCP. Vlan tersebut mendistribusikan IP Address yang berbeda-beda setiap lantainya dan telah memiliki inter koneksi antar vlan, dimana IP Address dapat saling berkomunikasi satu dengan yang lain.

4. Network Tool Kit

Tang Cramping Tool, kabel tester, cable UTP dan Konektor RG45 merupakan network toolkit yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informasi. Network Tool Kit ini berfungsi sebagai alat bantu untuk menangani kendala-kendala yang terdapat didalam sebuah jaringan khususnya jaringan fisik.

Tang Cramping berfungsi sebagai penjepit konektor RG45 dan kabel UTP. Ada 2 jenis katagori jenis kabel yang kita kenal di jaringan computer yaitu Kabel Straight dan Kabel Cross over. Kedua jenis katagori kabel tersebut dapat dilakukan pengetesan dengan kabel tester, apakah kabel tersebut layak atau tidak dipergunakan.

2.3.1.2. Hardware

- Server

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya mempunyai 3 server yang dipergunakan sebagai LPSE server, Web Server dan Back Up Server. Semua server menggunakan system operasi open source dan menggunakan IP Address Public, dimana semua server dapat diremote dari luar.

Mail server menangani khusus e-mail yang mana dapat diakses dan diberikan secara cuma-cuma dengan hanya mendaftarkan akun email. Web server menangani khusus situs Pemerintahan Dharmasraya, dengan domain

www.dharmasrayakab.go.id. Situs Pemerintah Kabupaten Dharmasraya ataupun situs OPD yang terintegrasi dengan domain induk memberikan informasi kepada masyarakat Kabupaten Dharmasraya yang menginginkan informasi secara cepat. Situs Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat diakses dari telepon genggam sehingga masyarakat dapat dengan cepat mendapatkan informasi. Bahkan tahun 2017 ini sudah terdaftar di aplikasi Play Store, sehingga pengguna android telah dapat mendownload tersebut secara gratis.

- **Perangkat Komunikasi**

Alat yang digunakan untuk komunikasi antar OPD yaitu masih menggunakan Telephon.

2.3.2 Data Aplikasi

- **Operating System (Win7, Linux, CENTOS 68)**

Operating system atau sistem operasi yang digunakan untuk komputer pengguna sehari-hari adalah Microsoft Windows berlisensi sedangkan pada server sistem operasi yang digunakan adalah open source dengan berbagai distribusi variannya. Kedepan dinas komunikasi berharap dapat mendukung dan menerapkan free open source system hal ini sesuai dengan semangat himbauan kementerian pendayagunaan aparatur untuk penggunaan sistem operasi gratis atau open source.

2.3.2 Data Multimedia

- **Kamera**

Untuk mendukung kegiatan peliputan, diskominfo menggunakan kamera. Kamera tersebut yaitu :

1. Kamera DSLR

Kamera SLR ada 1 buah

2.3.3. Data Pendukung Administrasi

- **NOTEBOOK/LAPTOP**

6 buah aset

- **PRINTER**

3 buah aset

2.3.4 Data Produk Layanan

2.3.4.1 Teknologi Informasi

- **Website**

Website atau biasa dikenal dengan portal yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika adalah portal Pemerintah Kabupaten Dharmasraya portal www.dharmasrayakab.go.id. Masyarakat dapat menggunakan website untuk menikmati layanan informasi dan layanan pengaduan lewat media online. Saat ini hampir setiap hari portal Pemkab Dharmasraya selalu menyajikan berita-berita terbaru dan foto-foto kegiatan dengan 3 sampai 5 berita dan foto setiap hari. Pengaduan dari masyarakat sekitar 2 sampai 4 pengaduan setiap hari.

- **SMS Gateway**

SMS gateway merupakan layanan pengaduan yang bisa melayani masyarakat yang akan mengadu ataupun menginformasikan sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan, infrastruktur ataupun potensi lokal. Media yang digunakan SMS Gateway dengan menggunakan nomor telpon 082285330001.

- **Media Sosial**

Media sosial yang dipakai dan digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui media facebook dengan akun *Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya*.

- **Hotspot**

Titik point hot spot yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika terdapat di 4 (empat) lokasi yaitu di Pasar Lama Pulau Punjung, Kantor Wali Nagari Sikabau, Kantor Wali Nagari Koto Baru dan Kantor Wali Nagari Sungai Rumbai. Masyarakat dapat menggunakan hotspot dan menikmati layanan internet dengan cuma-cuma.

2.3.4.2 Desiminasi Informasi

Desiminasi Informasi Kabupaten Dharmasraya melalui media center Dharmasraya yang terkoneksi dengan situs resmi Kementrian Komunikasi dan Informasi yaitu infopublik.id.

2.3.5.3 POS DAN TELEKOMUNIKASI

- MENARA

Berdasarkan hasil survey tahun 2016, jumlah menara dan BTS yang ada di Kabupaten Dharmasraya adalah sebanyak 85 BTS yang terletak pada 85 menara telekomunikasi. 87 BTS dioperasikan oleh tujuh (7) operator telekomunikasi yaitu :

1. Telkomsel
2. Telkom
3. DMT
4. TBG
5. Indosat
6. XL Axiata
7. Protelindo

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tupoksinya merupakan lembaga teknis daerah yang cukup strategis dalam menentukan kebijakan program pengembangan bidang telematika di daerah, kurangnya jumlah Pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya menjadi permasalahan internal karena dalam menjalankan tupoksinya diperlukan faktor-faktor pendukung Sumber Daya Manusia.

Perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia selalu berjalan dari masa kemasa. Sebagai Negara yang sedang berkembang, selalu mengadopsi berbagai teknologi informasi hingga akhirnya tiba di suatu masa di mana penggunaan internet mulai menjadi “makanan” sehari-hari yang dikenal dengan teknologi berbasis internet (*internet based technology*). Saat ini pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sedang menuju pada era SMART CITY, yang melibatkan sektor pemerintah (*government*) selaku fasilitator, sektor publik (*citizen*) selaku pengguna layanan informasi dan komunikasi, dan

sektor komunitas (*business*) selaku mitra pemerintah dalam melakukan berbagai terobosan dan inovasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi didalam Smart City merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitas utama bagi kegiatan di berbagai sektor kehidupan dimana juga memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur operasi dan manajemen pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial, lingkungan, UKM (Usaha Kecil Menengah), perhubungan dan perizinan. Oleh karena itu sangatlah penting peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) TIK, mulai dari keterampilan dan pengetahuan, perencanaan, pengoperasian, perawatan dan pengawasan, serta peningkatan kemampuan TIK para pimpinan di lembaga pemerintahan, pendidikan, UKM (Usaha Kecil Menengah) dan komunitas TIK. Sehingga pada akhirnya akan dihasilkan output yang sangat bermanfaat baik bagi manusia sebagai individu itu sendiri maupun bagi semua sektor kehidupan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance. Salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi komunikasi dan informasi atau yang populer disebut e-Government. Pelaksanaan e-Government yang telah diimplementasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta.

Sementara itu permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut;

1. Masih banyak daerah-daerah yang terisolir/blank spot serta belum mendapatkan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi terutama pada sentra-sentra perekonomian yang ada di Kabupaten Dharmasraya;
2. Belum tersedianya Grand Design (Master Plan) TIK Kabupaten Dharmasraya untuk pembangunan dan pengembangan TIK di Kabupaten Dharmasraya dikarenakan keterbatasan anggaran.
3. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang baik secara kualitas dan kuantitas
4. Belum adanya kebijakan yang kuat guna mendukung implementasi e-Government, sulitnya koordinasi kelembagaan, dan belum adanya aplikasi perencanaan berdasarkan penilaian berkala.
5. Belum adanya kegiatan di bidang persandian karena bidang itu baru berlaku setelah ditetapkannya OPD baru.
6. Belum adanya kegiatan di bidang statistik karena bidang itu baru berlaku setelah ditetapkannya OPD baru.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Sebelum menetapkan Visi, Misi dan Program Kerja Dinas, maka perlu dikaji secara mendalam Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) terpilih yang dimuat dalam RPJMD 2016-2021.

Berdasarkan naskah RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2016-2021, Visi, Misi, dan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati adalah :

Tabel 3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah.

VISI KABUPATEN	MISI KABUPATEN	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN
<p>Menuju Dharmasraya Mandiri dan Berbudaya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kesehatan, kecakapan, keahlian, sikap, dan moralitas sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan keharmonisan masyarakat. 2. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah sebagai pelayanan dasar daerah secara merata dan sumber kemajuan ekonomi. 3. Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, pertambangan, peternakan, perikanan, dan pariwisata secara optimal dan bernilai tambah besar mensejahterakan masyarakat. 4. Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal dan maju sehingga mampu membangun berbagai potensi daerah. 6. Memberdayakan nagari 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah. 2. Membangun berbasis nagari. 3. Membangkitkan identitas daerah. 4. Memeratakan infrastruktur. 5. Memajukan pendidikan yang berkarakter. 6. Meningkatkan derajat kesehatan. 7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi. 8. Membangun dengan semangat keberlanjutan (mewujudkan <i>sustainable development</i>).

	<p>dan kelompok masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.</p> <p>7. Menegakkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya sebagai norma sosial dan semangat membangun.</p>	
--	--	--

Dengan memperhatikan matriks Visi, Misi dan Prioritas Pembangunan tersebut diatas tampak jelas bahwa hasil akhir yang diharapkan dari seluruh rangkaian perencanaan pembangunan Kabupaten Dharmasraya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga masyarakat Dharmasraya.

Pemerintahan yang baik merupakan keinginan masyarakat yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik yang baik, hal tersebut menekankan pemerintah untuk dapat melaksanakan pelayanan yang optimal, karena bersamaan dengan peningkatan pengetahuan dan keberanian masyarakat harus diimbangi pula dengan perubahan penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien.

3.3. Telaah Renstra Organisasi, Lembaga/Kementerian

Sebagaimana disebutkan diawal, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 – 2021. Sedangkan dalam skala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Renstra merupakan Acuan dari bidang-bidang dan bagian dalam Dinas Komunikasi dan Informasi untuk menyusun rencana kerja tahunan.

Dalam proses penyusunannya, pedoman teknis dan sistematika Renstra Dinas mengacu kepada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, serta mempertimbangkan dokumen perencanaan yang relevan. Karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya mempunyai hubungan fungsional dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Berdasarkan telaahan Kementrian Komunikasi dan Informatika RI permasalahan yang berkaitan dengan informasi mengacu kepada Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut :

1. Minimnya informasi edukatif yang sampai ke masyarakat.
2. Kurang transparannya informasi dari badan publik kepada masyarakat.
3. Tidak meratanya sistem jaringan komunikasi.

Berdasarkan hal diatas maka paradikma keterbukaan informasi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi secara cepat dan handal.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi sebagai hak masyarakat.
- c. Mengintegrasikan data dan aplikasi layanan informasi berbasis teknologi informasi.
- d. Menyusun pedoman layanan informasi dan komunikasi publik.
- e. Melibatkan kelompok informasi masyarakat yang berfungsi sebagai juru penerang (diseminasi) informasi.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kondisi Lingkungan Strategis

Wilayah pedesaan dicirikan dengan masih kurangnya fasilitas ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, transportasi dan teknologi informasi. Dengan masih kurangnya fasilitas tersebut, maka mobilitas ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan masih terbatas. Dengan kondisi tersebut, maka perlu peningkatan fasilitas komunikasi dan informatika untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap informasi dan komunikasi.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya mempunyai tugas dan fungsi untuk mengelola permasalahan tersebut, sehingga permasalahan yang ada tidak menjadi kendala dalam pembangunan kabupaten.

Di masa depan sangat dibutuhkan aparatur pemerintah yang kompeten dan profesional dalam menjalankan birokrasi pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Memasuki era teknologi informasi yang begitu cepat maka aparatur pemerintah wajib memiliki kompetensi dan kualifikasi teknis yang baik sehingga dapat mewujudkan layanan e-government.

Kabupaten Dharmasraya mempunyai posisi yang strategis, karena secara geografis terletak diantara tiga Provinsi yaitu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Provinsi Jambi. Disamping itu Kabupaten Dharmasraya dibelah oleh jalur Lintas Sumatera yang menghubungkan pulau Sumatera sampai ke Pulau Jawa.

Sebagai wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan Provinsi dan Kabupten/Kota lainnya, hal ini membuat masyarakat membutuhkan sebuah fasilitas komunikasi dan informasi yang lebih handal, sehingga keterbatasan dengan akses dengan pusat-pusat Pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota lainnya, menuntut masyarakat harus mempunyai fasilitas komunikasi dan informatika lainnya.

Kondisi tersebut diatas harus mampu dijawab dengan postur, profil dan kinerja yang profesional dari aparatur pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Aparatur Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebagai pelaksana dari keputusan dan kebijakan pimpinan daerah menjadi pimpinan dan bawahan diseluruh lembaga, dinas, kantor dan organisasi perangkat daerah yang ada.

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi secara optimal, maka PNS akan atau sedang menduduki posisi jabatan struktural harus dapat berperan aktif menjalankan fungsi birokrasi yang di amanahkan, sesuai dengan peraturan peundangan yang berlaku.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dengan memperhatikan kondisi Kabupaten Dharmasraya yang berada di wilayah yang jauh dari pusat pemerintah Provinsi dan Pusat dari aspek geografis, pertumbuhan ekonomi, dinamika sosial, budaya dan politik yang masih jauh dari yang diharapkan, juga lihat dari jumlah, kualifikasi dan potensi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Dharmasraya dikaitkan dengan perkembangan Teknologi Informatika, maka dalam layanan komunikasi dan informasi terdapat beberapa isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam menyusun Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain :

1. Keterbukaan Informasi Publik

Informasi Publik memiliki makna: segala informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim,dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, reformasi dalam NKRI membawa perubahan dalam sistem Pemerintahan Negara yang ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan ditetapkannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses

kebijakan publik. Hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Keterbukaan informasi publik mempunyai makna yang luas, karena semua pengelolaan badan/instansi publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Maka semua badan/instansi publik berkewajiban untuk menyampaikan informasi publik secara terbuka kepada masyarakat.

Tujuan dari Undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan instansi publik negara dalam memberikan informasi kepada masyarakat, sekaligus guna mencerdaskan masyarakat dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.

Dalam implementasinya, membutuhkan kesiapan yang cukup memadai bagi kesiapan instansi publik yang akan memberikan layanan informasi publik. Karena selain diperlukannya aturan teknis yang lebih jelas mengatur hal ini, juga diperlukan adanya kesiapan masyarakat untuk mengetahui hak memperoleh informasi publik, diperlukan adanya pemahaman dan edukasi undang-undang tersebut baik kepada kalangan masyarakat maupun bagi instansi publik yang melakukan pelayanan publik itu sendiri.

2. Komitmen terhadap e-development

Di era globalisasi, teknologi informasi berperan sangat penting. Kemajuan yang pesat dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi di negara-negara maju karena didukung oleh sistem informasi yang mapan. Sebaliknya sistem informasi yang lemah di negara berkembang, termasuk Indonesia, mengakibatkan keterbelakangan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Informasi merupakan modal utama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang menjadi senjata pokok untuk membangun negara/wilayah. Sehingga apabila ingin tetap eksis dalam persaingan global, maka penguasaan terhadap informasi adalah mutlak perlu. Pun demikian dengan kecepatan dan ketepatan informasi, karena cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu berpacu dengan adanya informasi yang lebih baru.

Perkembangan teknologi informasi di Kabupaten Dharmasraya memerlukan komitmen dari semua pihak, terutama aparatur pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, dan masyarakat luas sebagai stakeholder.

Membangun sistem informasi dan komunikasi, merupakan proses dinamis yang berkesinambungan dan membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Sistem yang telah

terbangun menjadi bagian integral dalam pembangunan itu sendiri untuk semakin memberikan nilai yang lebih bagi pemilik teknologi itu sendiri.

Peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana untuk selalu mampu menyeimbangkan diri dengan perkembangan teknologi informasi menjadi bagian terpenting dalam membangun sistem informasi pemerintah yang berhasil dan bermanfaat bagi birokrasi dan pemerintah.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Pencapaian tujuan dalam organisasi didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi Kabupaten Dharmasraya, hal ini dimaksudkan agar organisasi mampu mencapai tujuan dan sasaran sehingga tidak ada suatu aktifitas yang terbengkalai. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya dalam kurun waktu 1 sampai 5 tahun ke depan untuk mencapai hal tersebut harus memperhatikan sumberdaya yang dimiliki, kemampuan yang ada serta faktor lingkungan yang akan selalu mempengaruhi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

Adapun tujuan yang akan dicapai adalah :

1. Pelayanan keterbukaan informasi;
2. Terselenggaranya statistic sektoral; dan
3. Peningkatan pengamanan informasi daerah

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya adalah :

1. Meningkatnya akses layanan informasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.
2. Ketersediaan startistik sektoral dan elemen data.
3. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah.
4. Penyelenggaraan persandian untuk pemngamanan informasi daerah.

Indikator sasaran adalah sebagai berikut :

1. Persentase wawasan masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik.
2. Persentasi ketersediaan data startistik sektoral.
3. Persentasi ketersediaan elemen data statistik sektoral.

4. Persentasi OPD yang melaksanakan tata kelola penjaminan informasi terkelarifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Jumlah pelaksanaan persandian antar daerah dan luar daerah.

Table 4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang akan dicapai	Sasaran yang ingin dicapai	Indikator Sasaran
Pelayanan keterbukaan informasi	Meningkatnya akses layanan informasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik.
Terselenggaranya statistic sektoral	Ketersediaan startistik sektoral dan elemen data	Persentasi ketersediaan elemen data statistik sektoral
Peningkatan pengamanan informasi daerah	Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah	Persentasi OPD yang melaksanakan tata kelola penjaminan informasi terkelarifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
		Jumlah pelaksanaan persandian antar daerah dan luar daerah

Rencana strategi Dinas Kominfo adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan sistem layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, cepat dan handal
2. Melaksanakan tata kelola infrastruktur jaringan teknologi informasi secara terpadu

3. Mengintegrasikan sistem aplikasi pemerintahan untuk mempercepat pertukaran data
4. Membentuk kelompok informasi masyarakat untuk membantu pemerintah dalam diseminasi informasi program pemerintah
5. Meningkatkan kemampuan SDM dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi melalui diklat, workshop, seminar, praktek lapangan
6. Melakukan kegiatan layanan statistik sektoral , membentuk komplikasi data, membuat akurasi data statistik, mempublikasikan data statistik sektoral serta meningkatkan pengelolaan dan penginformasian data kepada masyarakat
7. Menyelenggarakan, menyediakan serta meningkatkan pengelolaan dan pengamanan operasional persandian.

Kebijakan Dinas Kominfo antara lain :

1. Menyediakan mekanisme dan prosedur standar layanan informasi publik
2. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik
3. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas layanan informasi publik
4. Menyediakan konten layanan informasi publik
5. Memetakan dan menyusun topologi sistem jaringan komunikasi
6. Menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana sistem jaringan komunikasi berbasis teknologi informasi terkini
7. Mengelola dan mengendalikan lalu lintas data dan komunikasi internet
8. Meningkatkan kapasitas aksesibilitas (bandwidth) sistem jaringan
9. Menyusun standarisasi perangkat lunak dan perangkat keras
10. Menyusun standar basis data
11. Menyusun mekanisme interoperabilitas antar data dan aplikasi
12. Menyediakan server basis data dan aplikasi
13. Menyediakan aplikasi baik yang berbasis web maupun yang berbasis mobile
14. Melakukan tuning (optimalisasi) aplikasi dan basis data untuk mempercepat aksesibilitas
15. Menyediakan dan memelihara data center
16. Pendataan dan seleksi komunitas
17. Pembinaan komunitas
18. Pelaksanaan bimbingan teknis kepada komunitas

19. Pemberdayaan komunitas
20. Membentuk dan membina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap OPD yang meliputi kepala dan staf PPID
21. Meningkatkan keahlian dan keterampilan operator di setiap OPD di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan pelayanan prima
22. Melaksanakan diklat, workshop, seminar dan praktek lapangan bagi PPID dan operator
23. Meningkatkan peran PPID sebagai juru bicara dan tenaga kehumasan
24. Meningkatkan peran PPID dan operator dalam menghimpun dan mengelola data
25. Membekali sarana dan prasarana teknologi informasi bagi PPID dan operator untuk kebutuhan layanan informasi publik
26. Survey bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM
27. Publikasi data statistik sektoral
28. Tercapainya peningkatan pengelolaan dan pengamanan operasional persandian

4.2 Strategi dan Kebijakan (tabel T-IV.C.27)

Strategi	Kebijakan
Menyediakan sistem layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, cepat dan handal	Menyediakan mekanisme dan prosedur standar layanan informasi publik
Melaksanakan tata kelola infrastruktur jaringan teknologi informasi secara terpadu	Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi public
Mengintegrasikan sistem aplikasi pemerintahan untuk mempercepat pertukaran data	Meningkatkan kapasitas dan kuantitas layanan informasi publik
Membentuk kelompok informasi masyarakat untuk membantu pemerintah dalam diseminasi informasi program pemerintah	Menyediakan konten layanan informasi publik
Meningkatkan kemampuan SDM dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi melalui diklat, workshop, seminar, praktek lapanga	Memetakan dan menyusun topologi sistem jaringan komunikasi

<p>Melakukan kegiatan layanan statistik sektoral , membentuk komplikasi data, membuat akurasi data statistik, mempublikasikan data statistik sektoral serta</p>	<p>Menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana sistem jaringan komunikasi berbasis teknologi informasi terkini</p>
<p>Menyelenggarakan, menyediakan serta meningkatkan pengelolaan dan pengamanan operasional persandian</p>	<p>Mengelola dan mengendalikan lalu lintas data dan komunikasi internet</p>
	<p>Meningkatkan kapasitas aksesibilitas (bandwidth) sistem jaringan</p> <p>Menyusun standarisasi perangkat lunak dan perangkat keras</p> <p>Menyusun standar basis data</p> <p>Menyusun mekanisme interoperabilitas antar data dan aplikasi</p> <p>Menyediakan server basis data dan aplikasi</p> <p>Menyediakan aplikasi baik yang berbasis web maupun yang berbasis mobile</p> <p>Melakukan tuning (optimalisasi) aplikasi dan basis data untuk mempercepat aksesibilitas</p> <p>Menyediakan dan memelihara data center</p> <p>Pendataan dan seleksi komunitas</p> <p>Pembinaan komunitas</p> <p>Pelaksanaan bimbingan teknis kepada komunitas</p> <p>Pemberdayaan komunitas</p>

	<p>Membentuk dan membina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap OPD yang meliputi kepala dan staf PPID</p> <p>Meningkatkan keahlian dan keterampilan operator di setiap OPD di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan pelayanan prima</p>
	<p>Melaksanakan diklat, workshop, seminar dan praktek lapangan bagi PPID dan operator</p> <p>Meningkatkan peran PPID sebagai juru bicara dan tenaga kehumasan</p> <p>Meningkatkan peran PPID dan operator dalam menghimpun dan mengelola data</p> <p>Membekali sarana dan prasarana teknologi informasi bagi PPID dan operator untuk kebutuhan layanan informasi publik</p> <p>Survey bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM</p> <p>Publikasi data statistik sektoral</p> <p>Tercapainya peningkatan pengelolaan dan pengamanan operasional persandian</p>

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Untuk itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan.

Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya untuk tahun 2016-2021 sebagai implementasi dari RPJMD adalah sebagai berikut :

PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG KOMINFO

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa :

- Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP
- Pengadaan alat Studio dan Komunikasi
- Lanjutan pembangunan jaringan Antar OPD
- Pemeliharaan jaringan Antar OPD

Program E-Government

- Perencanaan dan Pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
- Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi/E-Government

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

- Pemberdayaan Masyarakat Informasi
- Sosialisasi dan Pembentukan kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
- Sosialisasi Internet Sehat

Program Kerjasama Informasi dengan media Massa

- Monitoring, Evaluasi dan pengendalian Sarana dan Prasarana Telekomunikasi
- Pengembangan Layanan Media Center

Program peningkatan Kualitas Layanan Informasi Berbasis TI

- Pengembangan / peningkatan kemampuan data base sistem informasi
- Pembangunan Sistem Informasi Daerah
- Pengembangan jaringan dan layanan Media Center
- Pengadaan jaringan WiFi gratis untuk masyarakat
- Pengelolaan SMS Pengaduan Masyarakat

Program Pengendalian Jasa usaha POS dan Telekomunikasi

- Pengendalian tertib usaha Jasa Pos dan Telekomunikasi

Program Komunikasi Publik

- Program Monitoring dan Evaluasi KPU-USO
- Sosialisasi dan diseminisasi Informasi
- Pemilihan Media Tradisional Terbaik
- Literasi Informasi Media Komunikasi
- Pekan Informasi Daerah

Bidang Statistik

Program Pengembangan Statistik Sektoral

- Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah
- Pengkajian dan Penelitian Komunikasi dan Informatika
- Survey Gender dan Anak
- Penyusunan Gini Rasio Daerah
- Penghitungan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dan Investasi
- Penghitungan Nilai Tukar Petani
- Penyusunan Analisis Tabel Input - Output (IO)

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

- Komplikasi Produk Administrasi Bidang Sosial
- Cetak Buku Saku Statistik Daerah
- Sosialisasi Statistik Daerah

- Sistem Informasi Data Center Daerah

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

- Belanja Sekretariat PPID
- Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah Daerah Kab. Dharmasraya
- Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab. Dharmasraya

Bidang Persandian

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

- Penyediaan kebijakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi milik pemerintah daerah
- Pengelolaan peralatan sandi dan jaring komunikasi sandi yang digunakan pemerintah daerah
- Penyediaan alat pendukung utama persandian yang digunakan pemerintah daerah
- Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian pada setiap perangkat daerah
- Koordinasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah
- Fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi
- Pengembangan sistem pengelolaan dan perlindungan informasi milik pemerintah daerah
- Penyediaan Analisis Kebutuhan Penyelenggaraan Persandian Untuk pengamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah
- Pengelolaan dan perlindungan informasi terbuka milik pemerintah dan yang dikecualikan milik pemerintah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Makanan dan Minuman

- Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
- Penyediaan Sarana Informasi

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan Barang Inventaris Kantor
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Bermotor
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Program Peningkatan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Program Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan

- Penyusunan Renstra 2016 – 2021, Renja dan Monev OPD
- Pengelolaan Data Informasi Kegiatan Setiap OPD

Table 5.1 Program dan Kegiatan

Program	Kegiatan
Bidang Kominfo	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP - Pengadaan alat Studio dan Komunikasi - Lanjutan pembangunan jaringan Antar OPD - Pemeliharaan jaringan Antar OPD
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	
Program E-Government	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan dan Pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi - Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi/E-Government

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan Masyarakat Informasi - Sosialisasi dan Pembentukan kelompok Informasi Masyarakat (KIM) - Sosialisasi Internet Sehat - Monitoring, Evaluasi dan pengendalian Sarana dan Prasarana Telekomunikasi - Pengembangan Layanan Media Center - Pengadaan jaringan WiFi gratis untuk masyarakat - Pengelolaan SMS Pengaduan Masyarakat
Program Pengendalian Jasa usaha POS dan Telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian tertib usaha Jasa Pos dan Telekomunikasi
Program Komunikasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Program Monitoring dan Evaluasi KPU-USO - Sosialisasi dan diseminasi Informasi - Pemilihan Media Tradisional Terbaik - Literasi Informasi Media Komunikasi - Pekan Informasi Daerah
Bidang Statistik	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah - Pengkajian dan Penelitian Komunikasi dan Informatika - Survey Gender dan Anak - Penyusunan Gini Rasio Daerah - Penghitungan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dan Investasi - Penghitungan Nilai Tukar Petani - Penyusunan Analisis Tabel Input - Output (IO)
Program Pengembangan Statistik Sektoral	
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Komplikasi Produk Administrasi Bidang Sosial
	<ul style="list-style-type: none"> - Cetak Buku Saku Statistik Daerah

	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Statistik Daerah - Sistem Informasi Data Center Daerah
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Belanja Sekretariat PPID - Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah Daerah Kab. Dharmasraya - Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab. Dharmasraya
Bidang Persandian	
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan kebijakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi milik pemerintah daerah - Pengelolaan peralatan sandi dan jaring komunikasi sandi yang digunakan pemerintah daerah - Penyediaan alat pendukung utama persandian yang digunakan pemerintah daerah - Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian pada setiap perangkat daerah - Koordinasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah - Fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi - Pengembangan sistem pengelolaan dan perlindungan informasi milik pemerintah daerah

	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Analisis Kebutuhan Penyelenggaraan Persandian Untuk pengamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah - Pengelolaan dan perlindungan informasi terbuka milik pemerintah dan yang dikecualikan milik pemerintah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Makanan dan Minuman - Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah - Penyediaan Sarana Informasi
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Barang Inventaris Kantor - Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Bermotor - Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Program Peningkatan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Program Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Renstra 2016 – 2021, Renja dan Monev OPD - Pengelolaan Data Informasi Kegiatan Setiap OPD

5.2. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Untuk mengimplementasikan program dan kegiatan seperti tersebut diatas, maka telah disusun kelompok sasaran dan pendanaan indikatif untuk masa 5 (lima) tahun kedepan. Susunan selengkapnya dalam bentuk matriks, dapat dilihat pada lampiran.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA TAHUNAN

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan berisi tentang pencapaian kegiatan.

Adapun susunan selengkapnya dapat dilihat dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Indikator kinerja Tahunan

PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG KOMINFO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Out Come) dan KEGIATAN (Out Put)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Target	Target	Target	Target	Target	Target
Program pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa							
Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perizinan, pengawasan dan pengelolaan Warnet		0	1	0	0	1
Pengadaan alat Studio dan Komunikasi	Jumlah peralatan Server Website Resmi Kabupaten Dharmasraya beserta sub domainnya.		0	1	1	1	1
Lanjutan pembangunan jaringan Antar OPD	Jumlah OPD yang terkoneksi melalui jaringan		15	20	25	30	0
Pemeliharaan jaringan Antar OPD	Jumlah OPD yang terkoneksi melalui jaringan		0	15	35	60	90
Program E-Government							
Perencanaan dan Pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Jumlah Master / site Plan E-Government		1	1	0	0	0
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi/E-Government	Jumlah aparat pemerintah yang dapat mengoperasikan dan mengelola website yang nantinya akan dipercaya menjadi web admin website		20	35	60	80	90
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi							
Pemberdayaan Masyarakat Informasi	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Informasi		0	4	3		0
Sosialisasi dan Pembentukan kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Jumlah Kelompok		4	2	2	2	2

Sosialisasi Internet Sehat	Jumlah siswa yang pahamakan pemanfaatan internet secara sehat		0	100	100	150	200
Program Kerjasama Informasi dengan media Massa							
Monitoring, Evaluasi dan pengendalian Sarana dan Prasarana Telekomunikasi	Jumlah kunjungan		100	120	128	136	140
Pengembangan Layanan Media Center	Jumlah Fasilitas Media Center di Kab.Dharmasraya		0	15	20	0	0
Program peningkatan Kualitas Layanan Informasi Berbasis TI							
Pegembangan / peningkatan kemampuan data base system informasi	Prosentasiter updatenya design, module dan konten Website berbasis Database		0	100	100	0	0
Pembangunan Sistem Informasi Daerah	Jumlah Sistem Informasi OPD yang ada di Kabupaten Dharmasraya		0	15	20	0	0
Pengembangan jaringan dan layanan Media Center	Prosentasi terlayannya kebutuhan wartawan dan masyarakat dalam pemanfaatan Media Center		0	100	100	0	0
Pengadaan jaringan WiFi gratis untuk masyarakat	Jumlah hot spot area free WiFi Publik terutama pada daerah yang tidak dilalui kabel Telepon		0	12	10	0	0
Pengelolaan SMS Pengaduan Masyarakat	Jumlah SMS Pengaduan masyarakat yang dapat dikelola dan ditindak lanjuti		5	7	6	0	0
Program Pengendalian Jasa usaha POS dan Telekomunikasi							
Pengendalian tertib usaha Jasa Pos dan Telekomunikasi	Persentase cakupan upaya bina JasaPos dan telekomunikasi		0	100	100		0
Program Komunikasi Publik							
Program Monitoring dan Evaluasi KPU-USO	Jumlah Lokasi KPU-USO di Kabupaten Dharmasraya yang di evaluasi dan di monitor		0	25	23	0	0
Sosialisasi dan diseminasi Informasi	Jumlah masyarakat yang menerima informasi penting terkait situasi terkini dan perkembangan pembangunan		0	15	12	0	0
Pemilihan Media Tradisional Terbaik	Jumlah media tradisional yang di fasilitasi untuk mengikuti lomba media tradisional tingkat provinsi		0	35	40	0	0
Literasi Informasi Media Komunikasi	Terlaksananya Literasi Media Online		0	100	100	0	0
Pekan Informasi Daerah	Jumlah media informasi		0	35	40	0	0

PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PERSANDIAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Out Come) dan KEGIATAN (Out Put)						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Target	Target	Target	Target	Target	Target
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi							
Penyediaan kebijakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi milik pemerintah daerah	Jumlah aturan / SOP tentang persandian daerah		0	1	0	0	1
Pengelolaan peralatan sandi dan jarring komunikasi sandi yang digunakan pemerintah daerah	Jumlah peralatan sandi yang di kelola		0	1	1	1	1
Penyediaan alat pendukung utama persandian yang digunakan pemerintah daerah	Jumlah peralatan pendukung sandi tersedia		15	20	25	30	0
Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian pada setiap perangkat daerah	Jumlah media informasi yang terkelola		0	15	35	60	90
Koordinasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah	Jumlah koordinasi persandian yang terlaksana						
Fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Jumlah sandimen terlatih		1	1	0	0	0
Pengembangan system pengelolaan dan perlindungan informasi milik pemerintah daerah	Jumlah perangkat pengamanan Informasi milik daerah		20	35	60	80	90
Penyediaan Analisis Kebutuhan Penyelenggaraan Persandian Untuk pengamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Kebutuhan Penyelenggaraan Persandian Untuk						

	pengamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah						
Pengelolaan dan perlindungan informasi terbuka milik pemerintah dan yang dikecualikan milik pemerintah	Jumlah sarana informasi terbuka milik pemerintah terkelola dan yang terkecualikan oleh pemerintah daerah terkelola		0	4	3		0

PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG STATISTIK	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Out Come) dan KEGIATAN (Out Put)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Target	Target	Target	Target	Target	Target
Program pengembangan Statistik sektoral							
Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah	Jumlah Publikasi Statistik Potensi dan Kekhasan Daerah		50	60	70	85	95
Pengkajian dan Penelitian Komunikasi dan Informatika	Ketersediaan Data Pembangunan Komunikasi dan Informatika		50	60	70	80	90
Survey Gender dan Anak	Jumlah Data Terpilah Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur			100%			
Penyusunan Gini Rasio Daerah	Rasio Ketimpangan Pendapatan Masyarakat			100%			
Penghitungan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dan Investasi	Persentase Ekonomi Makro Kab. Dharmasraya			100%			
Penghitungan Nilai Tukar Petani	Persentase Tingkat Kesejahteraan Petani			100%			
Penyusunan Analisis Tabel Input - Output (IO)	Indeks Hubungan dan Keterkaitan antar sektor ekonomi			5			
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah							
Komplikasi Produk Administrasi Bidang Sosial	Jumlah Publikasi Data Terpilah Gender dan Anak			4			
Cetak Buku Saku Statistik Daerah	Jumlah Publikasi Data Bidang Ekonomi		100	110	150	150	175
Sosialisasi Statistik Daerah	Jumlah masyarakat yang menerima informasi penting tentang statistik daerah			100	100	100	100

Sistem Informasi Data Center Daerah	Terlaksananya sistem informasi data daerah			1	1	1	1
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik							
Belanja Sekretariat PPID	Terlaksananya Operasional PPID			1	1	1	1
Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah Daerah Kab. Dharmasraya	Persentase informasi Publik Yang Disediakan Pemerintah Daerah			60%	75%	70%	85%
Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab. Dharmasraya	Persentase Penduduk Yang Terpapar Informasi Publik Pemerintah Daerah			60%	70%	70%	90%

DATA DAN INFORMASI

Untuk memastikan hal tersebut perlu diperhatikan beberapa indikator sebagai berikut, yaitu

1. Data dan informasi yang dikembangkan harus selaras dengan kebutuhan pemerintahan;
2. Data dan informasi dikelola secara baik dan bertanggung jawab sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintahan;
3. Keakuratan data dan informasi dapat diwujudkan dengan menghindari duplikasi sumber, mencegah data yang bersifat sporadis serta menjamin setiap sumber data dan informasi yang disebarakan sudah melalui verifikasi yang jelas.
4. Efektifitas melalui integrasi infrastruktur data dan informasi. Resiko yang muncul dalam penyebarluasan data dan informasi ditekan hingga batas yang dapat diterima.

BAB VII

PENUTUP

Membahas dan menjabarkan mengenai penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan, serta catatan dan harapan Dinas.

Semakin cepatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut manusia untuk mencoba membuat perubahan di segala jenis kehidupannya yang tujuannya adalah mendapatkan hasil maupun kondisi yang terbaik yang dapat dicapai. Keterlibatan peran serta masyarakat dan komunitas merupakan bagian yang tak dapat terpisahkan dari implementasi Smart City sebagai mitra pemerintah untuk mewujudkan layanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Banyaknya sektor kehidupan masyarakat yang ada diharapkan dapat membuka peluang dan inovasi baru di bidang teknologi informasi dan komunikasi bagi manusia untuk menciptakan sesuatu yang baru untuk kemajuan peradaban manusia. Diharapkan di masa depan, implementasi Smart City ini dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi kehidupan masyarakat secara efektif dan efisien.